

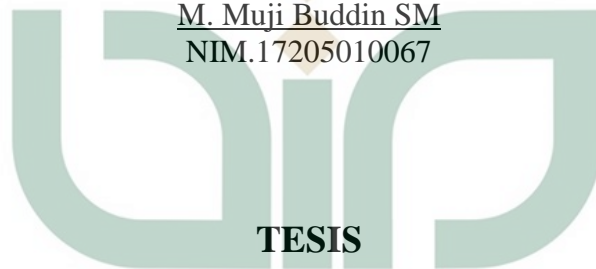
**KRITIK EPISTEMOLOGI NKRI BERSYARIAH:**

**Studi atas Pemikiran Habib Rizieq Syihab**



Oleh:

M. Muji Buddin SM  
NIM.17205010067



**TESIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama (M.Ag)

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Muji Buddin SM  
NIM : 17205010067  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

  
M. Muji Buddin SM

NIM: 17205010067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156  
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.056/Un.02/DU/PP/05.3/01/2020

Tesis berjudul : KRITIK EPISTEMOLOGI NKRI BERSYARIAH :Studi Atas  
Pemikiran Habib Rizieq Syihab

yang disusun oleh

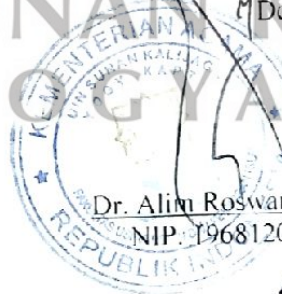
Nama : M. MUJI BUDDIN SM, S.Sos  
NIM : 17205010067  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik  
Tanggal Ujian : 27 Desember 2019

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 08 Januari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

M. Dekan,



Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196812081998031002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KRITIK EPISTEMOLOGI NKRI BERSYARIAH: Studi atas Pemikiran Habib Rizieq Syihab

Nama : M. Muji Buddin SM

NIM : 17205010067

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi : Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Munawar Ahmad, S. S, M. Si.

Penguji I : Dr. Mutiullah, S. Fil. I, M. Hum.

Penguji II : Dr. Robby Habiba Abror, S. Ag, M. Hum.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2019

Pukul : 08:00 s/d 09:30 WIB

Hasil/ Nilai : A- 90 dengan IPK : 3,76

Predikat : *Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\**

\* Coret yang tidak perlu

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Kritik Epistemologi NKRI Bersyariah: Studi Atas Pemikiran Habib Rizieq Syihab**


Yang ditulis oleh :

Nama : M. Muji Buddin SM  
NIM : 17205010067  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Desember 2019  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
Dr. Munawar Ahmad, S. S., M.Si  
NIP. 19691017 200212 1 001

Halaman Motto

Tuhan Tidak Perlu Dibela

(Abdurrahman Wahid)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

\

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Aqidah dan Filsfat Islam konsentrasi Filsfat Islam, teman-teman, dan keluarga di Mojokerto terutama untuk Almh. Ibu Ma'rufah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi wacana NKRI Bersyariah Habib Rizieq Syihab. Wacana NKRI Bersyariah merupakan salah satu varian wacana politik Islam yang saat ini berkembang di Indonesia. Habib Rizieq, selaku penggagas wacana ini, hadir dalam diskursus politik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Nalar yang dibangun dalam wacana NKRI Bersyariah adalah nalar politik yang ingin memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Habib Rizieq membangun argumentasi nalarnya berdasarkan nash al-Qur'an dan hadist, serta dasar negara Indonesia. Dasar negara ini ditafsirkan oleh Habib Rizieq dengan maksud untuk memperkuat argumentasinya bahwa Indonesia sejak dulu telah menerapkan syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah; *Pertama*, untuk mengetahui motif-motif yang menggerakkan nalar politik Habib Rizieq; *Kedua*, untuk mengetahui bentuk atau wujud negara Islam versi Habib Rizieq; *Ketiga*, untuk mengetahui hasil uji falsifikasi pengetahuan dalam kontruksi epistemologinya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model library research (studi kepustakaan) dengan objek kajian pemikiran NKRI Bersyariah Habib Rizieq Syihab. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah arkeologi dan genealogi Michel Foucault. Sementara teori yang digunakan dalam kerangka berpikir penelitian ini adalah teori politik Abid Al Jabiri tentang motif-motif (*muhaddidat*) dan manifestasi (*tajalliyat*) politik Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, NKRI Bersyariah digerakkan oleh motif aqidah atau ideologi Islam merujuk pada sejarah Nabi; *kedua*, bentuk negara NKRI Bersyariah adalah negara Islam yang berdiri di atas syariat Islam dan berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; *Ketiga*, hasil uji falsifikasi NKRI Bersyariah adalah tidak terkokohkan (*corroboration*). Letak dari tidak terkokohnya NKRI Bersyariah berada pada pemaksaan penafsiran dan ketidaksesuaian pengetahuan yang digunakan dalam NKRI Bersyariah, sehingga apabila NKRI Bersyariah terealisasikan sebagai bentuk negara konkrit maka akan melahirkan rezim oligarki yang represif.

Keyword: Habib Rizieq, NKRI Bersyariah, Negara Islam, *Muhaddidat*, *Tajalliyat*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berusaha untuk menyusun ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan juga dorongan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. H. Zuhri, S.Ag, M. Ag selaku Ketua Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan nasihat, arahan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Imam Iqbal, S. Fil. I., M. S.I selaku sekretaris Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Munawar Ahmad, S. S., M. Si sebagai pembimbing yang dengan ikhlas, sabar, dan penuh kebijaksanaan dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Mutiullah, S. Fil. I, M. Hum selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, mengomentari dan memeberi masukan dalam sidang tesis.

7. Dr. Robby Habiba Abror, S. Ag, M. Hum, selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, mengkritik, dan mengomentari hasil tesis saya.
8. Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Keluarga di Mojokerto yang telah memberikan dukungan serta kecukupan materil kepada penulis.
10. Almh. Ibu Ma'rufah yang telah memberikan amanat terakhirnya untuk mendorong saya kuliah di prodi Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam 2018 yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.
12. Terimakasih juga untuk Rina Zuliana yang telah membantu diskusi, waktu, dan tenaga dalam keberlangsungan tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang melimpah dari Allah SWT. walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Penulis

M. Muji Buddin SM

NIM: 17205010067

## DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiasi .....	ii
Surat Pengesahan Tesis .....	iii
Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Nota Dinas Pembimbing.....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Abstraksi .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I NKRI Bersyariah: Isu Politik Kontemporer .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	15
3. Tujuan Penelitian.....	15
4. Kegunaan Penelitian.....	16
5. Metode Penelitian.....	16
5.1.Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	16
5.2.Teknik Pengumpulan Data .....	17
5.3.Teknik Analisis Data .....	17
6. Kajian Pustaka .....	21
7. Kerangka Teori .....	24
a. Nalar Politik Arab-Islam Abid Al Jabiri .....	24
a) <i>Political Unconsciousness</i> dan Imajinasi Sosial-Politik.....	25
b) Motif-Motif Penggerak Nalar Politik Arab-Islam.....	28
8. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II Melacak Landasan Nalar NKRI Bersyariah .....</b>	<b>31</b>
A. Biografi Habib Rizieq .....	31

a. Pendidikan Habib Rizieq.....	32
b. Karya Habib Rizieq.....	37
B. Gerakan Habib Rizieq di Indonesia .....	39
C. NKRI Bersyariah di antara Pemikiran Politik Islam Lainnya.....	59
<b>BAB III Negara <i>Toghut Vis a Vis</i> Negara Syariah.....</b>	<b>66</b>
A. Indonesia dalam Pandangan Habib Rizieq: <i>Toghut</i> .....	66
B. Epistemologi NKRI Bersyariah .....	72
a) Dalil Naqli Penerapan NKRI Bersyariah .....	74
b) Dalil Aqli Penerapan NKRI Bersyariah.....	77
C. Dasar Yuridis Konstitusional Penerapan NKRI Bersyariah .....	79
a) Pancasila.....	80
b) Undang-Undang Dasar 1945.....	89
c) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....	90
D. Motif-Motif NKRI Bersyariah .....	92
a) Motif Aqidah .....	92
b) Motif Qabilah .....	97
E. Musyawarah dan Pemerintahan Islam sebagai <i>Tajalliyat</i> NKRI Bersyariah.....	101
<b>BAB IV Falsifikasi Nalar NKRI Bersyariah .....</b>	<b>110</b>
A. Wujud Negara NKRI Bersyariah .....	110
B. Kritik atas Nalar Tafsir Dasar Negara Habib Rizieq .....	116
C. Kritik atas Nalar Tafsir Hukum Islam Habib Rizieq .....	123
D. Kritik atas Nalar Negara Musyawarah.....	133
E. Kritik atas Kritik Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme.....	148
a) Sekularisme .....	148
b) Pluralisme.....	151
c) Liberalisme.....	153
F. Negara <i>Toghut</i> di atas <i>Toghut</i> .....	155
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>164</b>

A. Kesimpulan .....	164
B. Saran.....	170
Daftar Pustaka .....	171



## **BAB I**

### **NKRI Bersyariah: Isu Politik Kontemporer**

#### **A. Latar Belakang**

Pergulatan politik di Indonesia pada akhir tahun 2016 tidak lepas dari isu gerakan keagamaan yang sedang berkembang. Habib Rizieq sebagai salah satu tokoh penting gerakan tersebut membawa wacana NKRI Bersyariah. Wacana NKRI Bersyariah merupakan sebuah konsep untuk menerapkan syariah Islam di Indonesia dan membentuk Indonesia Negara Islam (INI). Sebuah pengetahuan, wacana, atau teori tidak lepas dari konstruksi epistemologi. Habib Rizieq memiliki konstruksi epistemologi yang dibangun berdasarkan sumber pengetahuan dari tradisi Islam maupun tradisi Nusantara. Dengan demikian, melalui uji falsifikasi, peneliti berasumsi bahwa terdapat pemaksaan nalar epistemologi dalam wacana NKRI Bersyariah. Maka dari itu, untuk melihat asumsi ini, penelitian ini akan membicarakan tentang epistemologi NKRI Bersyariah secara kritis.

Penelitian ini memposisikan Habib Rizieq sebagai salah satu tokoh pemikir politik Islam di Indonesia berikut dengan gerakan dan pemikirannya. Habib Rizieq adalah salah satu tokoh pemikir Islam politik yang lahir di era reformasi. Pemikiran serta gerakannya bersama FPI hingga hari ini telah mampu menghadirkan warna baru dalam diskursus politik Islam pasca Reformasi. Di balik pemikiran politik Habib Rizieq terdapat bangunan epistemologi Islam. Fungsi dari epistemologi ini adalah memperkuat basis nalar politik NKRI Bersyariah.

Wacana tentang Islam sebagai basis epistemologi dalam politik hingga hari ini masih menjadi perdebatan panjang. Muhammad Arkoun, salah seorang filsuf muslim kontemporer, pernah membahas mengenai epistemologi dalam politik Islam. Arkoun mengkritik gagasan *khilafah* yang sedang berkembang di masa hidupnya. Menurutnya khilafah merupakan sebuah gagasan yang utopis. Arkoun berargumen bahwa isu khilafah ini tidak ada kesepakatan di kalangan umat dan disebabkan oleh adanya penafsiran teks agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing negara muslim.<sup>1</sup> Selain Arkoun, Abd Al Jabiri juga membahas pengertian dari *khilafah* dan *imamah* sebagai sistem politik Islam secara antropologi-epistemologis.

Pembacaan kritis atas epistemologi politik Islam bisa dibaca dengan beragam bentuk. Arkoun dan al Jabiri menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk mengkritisi epistemologi politik Islam di masa klasik. Kedua tokoh tersebut memiliki pendekatan yang sama, akan tetapi fokus kajiannya berbeda. Al Jabiri menekankan pada aspek tradisi (*turath*) untuk membaca epistemologi politik Islam, sedangkan Arkoun memfokuskan pada aspek historisitas dari perkembangan teks agama.

Di samping itu, kritik kedua tokoh tersebut sebagai komentar atas fenomena yang terjadi di Arab-Islam. Sejak jatuhnya dinasti Utsmaniyah bangsa Arab mulai terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Problem tersebut diperparah dengan adanya modernisasi dan globalisasi yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pasca Perang Dingin negara-negara Arab-Islam banyak yang mengkritik atas kebijakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Arkoun dalam Muhammad Rikza Muqtada, "Utopia Khilāfah Islāmiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun," *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): hlm. 145–164.

demokratisasi yang dicanangkan oleh negara Barat. Dengan demikian, menurut Samuel P. Huntington, fenomena kebangkitan Islam pasca Perang Dingin sebagai pengejawantahan ideologi Islam politik yang paling mengglobal. Huntington menambahkan bahwa pada periode tersebut umat Islam menegaskan kembali perihal Islam sebagai satu-satunya sumber identitas, sumber makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan dan harapan yang dinyatakan dalam slogan 'Islam adalah jalan keluar'.<sup>2</sup>

Jika diletakkan pada aspek epistemologi, Islam sebagai jalan keluar merupakan sebuah pembacaan yang dilakukan oleh para pemikir politik Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi. Konstruksi epistemologi konsep *imamah* dan *khilafah* didasarkan atas penafsiran dari khazanah keilmuan Islam. Penafsiran atas konsep tersebut telah menyebar ke Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah terjadi perdebatan panjang terkait dengan sistem negara Islam di Indonesia, misalnya M Natsir yang memiliki gagasan tentang demokrasi Islam. Hal ini juga tidak lepas dari adanya konstruksi epistemologi yang dilakukan oleh Natsir dengan mendasarkan kepada nash agama yaitu al-Qur'an dan hadist.

Begitu juga dengan pemikiran NKRI Bersyariah tidak lepas dari konstruksi epistemologi. Ia tidak muncul dari sebuah pengetahuan yang kosong, melainkan muncul dari sebuah retakan sejarah (*diskontinuitas*) yang diakibatkan oleh pergeseran rezim pengetahuan. Sebuah pengetahuan memiliki seperangkat epistemologi sebagai basisnya. Epistemologi dipahami sebagai sebuah ilmu yang meliputi sumber

---

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, Terj, M. Sadat Imail, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 183-87.



pengetahuan, mempertanyakan validitas pengetahuan, bagaimana pengetahuan manusia itu didapat, dengan cara apa dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga epistemologi sampai pada problem hubungan metodologi dengan obyek dari ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Sejarah filsafat telah mencatat bahwa secara umum terdapat dua aliran besar dalam epistemologi Barat. *Pertama*, empirisme dan *kedua* rasionalisme. Empirisme dan rasionalisme merupakan epistemologi yang dikembangkan dalam filsafat Barat. Metode rasionalisme mengandaikan bahwa akal harus diberi peran utama dalam penjelasan.<sup>4</sup> Sementara epistemologi yang bersumber dari metode empirisme meletakkan pengalaman di atas rasio atau akal.

Dua bentuk epistemologi ini sangat mendominasi dalam wacana filsafat Barat. Melalui dua epistemologi ini juga Barat mampu berkembang jauh dari segi pengetahuan. Kekuatan epistemologi yang dikembangkan oleh Barat telah mampu mengantarkan mereka kepada sebuah peradaban yang tinggi; yang modern; dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Dua bentuk epistemologi tersebut juga lahir dari adanya pergeseran rezim pengetahuan. Jika pada masa era kegelapan Gereja mendominasi namun setelah ada pengembangan ilmu pengetahuan yang dimotori oleh beberapa pemikir Barat Barat mampu keluar dari era kegelapan menuju era pencerahan. Pengembangan filsafat Barat tidak lepas dari pembacaannya atas filsafat Islam.

---

<sup>3</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.36.

<sup>4</sup> Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002),h. 929.

Dengan kata lain, epistemologi yang dikembangkan oleh Barat berawal dari pembacaannya atas karya-karya para filsuf muslim. Di abad pertengahan filsafat berkembang begitu pesat di dunia Islam. Filsafat telah banyak mempengaruhi cara berpikir para ilmuwan muslim pada masa itu. Perkembangan filsafat di dunia Islam juga tidak lepas dari peran ulama atau penerjemah yang berasal dari *baitul hikmah* di masa al-Makmun. Mereka menerjemahkan karya-karya filsafat dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab.<sup>5</sup> Peran serta kontribusi filsafat dalam ilmu keislaman telah memberikan corak tersendiri. Keilmuan Islam semakin berkembang pesat baik dalam tataran ilmu kalam, fiqh, maupun filsafat Islam sendiri.

Pengaruh filsafat dalam keilmuan Islam bisa dilihat dari perkembangan epistemologi di dunia Islam. Al-Jabiri menyatakan setidaknya ada tiga corak dalam epistemologi filsafat Islam, yaitu *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Pembacaan al Jabiri atas ketiga model tersebut berangkat dari tradisi (*turats*). Tradisi yang diambil oleh al Jabiri juga bukan pada masa Nabi Muhammad, bukan pula pada era Khulafa al-Rasyidin, melainkan pada masa kodifikasi (*tadwin*). Pembacaan epistemologi nalar Islam di masa kodifikasi al Jabiri menggunakan pendekatan metodologi post-struktural dan pos-modernis.<sup>6</sup>

Nalar *bayani* mencakup disiplin-disiplin ilmu yang menjadikan ilmu bahasa Arab sebagai tema sentralnya, seperti balaghah, nahwu, sharaf, ushul fiqh, fiqh, dan

---

<sup>5</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, (New York: The New American Library, 1970), h. 69

<sup>6</sup> Muhammad Abid Al Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, Terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003).

kalam. Tema-tema penting ini nantinya berimplikasi pada pemahaman terkait dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang merujuk pada teks. Epistemologi ini sebagai basis pengetahuan orang-orang yang berada dalam bidang *mutakallimun*. Sementara *irfani (gnostis)* tidak didasarkan pada objek eksternal atau runtutan logis, tetapi dari diri sendiri. Epistemologi *irfani* berkembang dalam tradisi tasawuf atau mistisisme dalam Islam. Terakhir epistemologi *burhani* memposisikan teks harus berdialog dengan realitas sosial yang ada, atau didialogkan dengan epistemologi *irfani* maupun *burhani*. Tradisi epistemologi ini biasanya dikenal dengan istilah *paripatetik* (berjalan-jalan). Proyek al Jabiri dalam menjelaskan epistemologi nalar Arab tersebut ingin membebaskan nalar Arab dari belenggu otoritas teks, otoritas masa lalu, dan membebaskan dari belenggu irasionalisme.<sup>7</sup> Selain itu, tiga epistemologi nalar Arab-Islam pada masa itu tidak lepas dari nash agama, baik posisinya sebagai utama maupun sekunder. Hal ini juga yang membedakan dengan epistemologi filsafat Yunani atau dalam filsafat Barat.

Tiga corak epistemologi di atas merupakan tema-tema besar yang sering dibahas dalam filsafat Islam. Melalui epistemologi tersebut juga dikembangkan ke dalam keilmuan lainnya, yang dalam hal ini politik Islam. Pembacaan tradisi, sejarah, maupun teks telah mampu melahirkan sebuah corak epistemologi politik Islam di masa itu. Di atas sudah disinggung bahwa dua tema besar dalam politik Islam berkisar tentang negara *khilafah* atau *imamah*. Dalam diskursus epistemologi politik

---

<sup>7</sup> Mohammad Abed Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, Terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 28–29.

Islam, kedua tema ini telah dikembangkan oleh para pemikir dari politikus sunni maupun syiah. Melalui konstruksi epistemologi yang kuat, pemikiran politik *khilafah* dan *imamah* telah mampu menjadikan diskursus yang panjang dalam tema politik Islam.

Epistemologi politik *imamah* didasarkan atas pemahaman tentang konsep seorang imam sekaligus sebagai kepala negara. Tugas dari seorang imam adalah membimbing, mengajarkan, dan contoh bagi rakyatnya. Seorang imam juga disebut sebagai pewaris Nabi. Seorang memiliki kualitas moral dan intelektual yang dijamin oleh Tuhan.<sup>8</sup> Pemilihan seorang imam tidak didasarkan pada pemilihan dari rakyat, namun langsung dipilih oleh Tuhan melalui tanda-tanda yang diberikan. Pemikiran politik *imamah* telah dikembangkan oleh aliran Syiah dan telah menjadi sistem kerajaan pada masa itu, berdampak dengan sistem kekhalifahan sunni.

Teori politik Islam sunni berkembang di era Dinasti Abbasyiah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Mawardi. Konstruksi epistemologi dalam teori politik sunni dikembangkan ketika dinasti Syiah mulai runtuh. Epistemologi pemerintahan yang dipegang oleh politik sunni terletak pada perbedaan fungsi seorang khalifah. Dalam teori politik sunni disebutkan bahwa adanya perbedaan antara otoritas agama dipegang oleh para ulama, sedangkan otoritas politik didukung oleh kekuatan militer.<sup>9</sup> Konstruksi epistemologi dalam seorang imam memiliki perbedaan dengan Syiah. Dalam pandangan politik sunni, seseorang menjadi imam

---

<sup>8</sup> Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Ilmu Semesta, 2001), hlm. 90–93.

<sup>9</sup> Black, hlm. 163.

tidak perlu terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan. Ia hanya perlu memiliki pandangan yang tegas tentang perang dan mampu menengahi perselisihan. Pandangan ini bertolak belakang dengan Syiah yang dinilai metafisik.

Teologi politik sunni yang dikembangkan oleh Al Mawardi menjadi salah satu rujukan paling komprehensif untuk menjelaskan batasan-batasan agama dan negara, serta menjelaskan hubungan antara *khilafah* dan *imamah*. Kuatnya konstruksi epistemologi yang dibangun oleh Al Mawardi membuat pemikirannya berpengaruh besar pada Dinasti Utsmani, terutama yang berhubungan dengan peran pengadilan agama dan hukum sekular di sebuah negara Islam.<sup>10</sup> Meski demikian, pemikiran al-Mawardi bukan lantas terbebas dari kritik. Pemikiran al-Mawardi kemudian dikritik oleh Ibn Taymiyyah (1263-1328). Kritikan yang diberikan oleh Ibn Taymiyyah kepada al-Mawardi terutama ditujukan pada epistemologi sistem politiknya.

Jika dalam pemikiran al-Mawardi dikenal sebagai penghubung antara seorang khalifah dengan *imamah*, yang kemudian berpengaruh besar dalam politik sunni, dan membedakan pengadilan agama dengan pengadilan umum, maka dalam pemikiran Ibn Taymiyyah justru sebaliknya. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari negara. Ibn Taymiyyah ingin membangun sebuah pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Konstruksi epistemologi yang digunakan oleh Ibn Taymiyyah memperkuat argumen tersebut dengan merujuk pada perintah Tuhan yang mengatakan bahwa pengetahuan dan pena sebagai tugas untuk menyampaikan dan

---

<sup>10</sup> Black, h. 178.

menyeru, serta kekuasaan dan pedang dengan tugas untuk menguasai dan mendominasi.<sup>11</sup>

Pemikiran Ibn Taymiyyah memiliki pengaruh besar kepada umat Islam pasca jatuhnya Dinasti Utsmani. Di saat tantangan modernitas dan peradaban dikendalikan oleh Barat, respon dari kalangan muslim justru ingin mengembalikan kejayaan Islam yang pernah hilang dengan cara menghidupkan kembali negara Islam. Pemikiran seperti ini mendapat kekuatan lebih ketika melihat terbentuknya negara sekuler Turki pasca jatuhnya Dinasti Utsmani. Seperti yang dicatat oleh Huntington di atas bahwa munculnya fenomena kebangkitan Islam dikarenakan adanya hegemoni dan proyek modernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap bangsa Arab-Islam, sehingga hal ini menuai perdebatan panjang di kalangan pemikir Islam untuk memikirkan kembali posisi Islam, negara, dan peradaban modern.

Dalam konteks ini muncul tokoh-tokoh pembaharu dari kalangan muslim untuk memikirkan kembali bagaimana bentuk negara Islam di tengah persoalan peradaban Barat. Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh penting dalam perbincangan politik Islam kontemporer. Epistemologi Sayyid Qutb dalam membicarakan persoalan Islam dan politik hampir sama dengan Ibn Taymiyyah. Menurutnya Islam tidak bisa dilepaskan dari sistem bernegara. Syariah Islam harus ditegakkan untuk menyelamatkan umat

---

<sup>11</sup> Black, h. 290–92.

Islam dari peradaban Barat. Sayyid Qutb sampai berkesimpulan bahwa peradaban Barat yang masuk ke negara Arab-Islam sebagai bentuk jahiliyah modern.<sup>12</sup>

Epistemologi yang dikembangkan oleh Sayyid Qutb dalam teori politik Islamnya tidak lepas dari pembacaan atas al-Qur'an. Di dalam teorinya tentang *hakimiyyat*, Sayyid Qutb meletakkan kedaulatan tunggal berada di tangan *hakim*, dalam hal ini Allah. Dalam posisi ini Sayyid Qutb hendak mengatakan bahwa posisi manusia adalah sama, maka manusia tidak boleh berkuasa atas manusia lainnya. Pandangan seperti lahir sebagai konsekuensi konsep Tauhid. Dalam konsep ini misi Islam menurut Sayyid Qutb tidak lain untuk membebaskan manusia dari kejahiliah; membebaskan dari belenggu nafsu dalam diri manusia. Maka dari itu, di dalam konsep *hakimiyah* Sayyid Qutb memilih adanya penyatuan antara agama dan negara.<sup>13</sup>

Pemikiran politik Islam Sayyid Qutb memiliki pengaruh besar di negara-negara Arab-Islam terutama di Mesir. Bersama dengan Ikhwanul Muslimin (IM) Sayyid Qutb bekerja sama dengan Gamal Abdul Nasir untuk menjatuhkan Raja Farouk. Namun ketika Gamal Abdul Nasser menjadi pemimpin Mesir, ideologi yang ditawarkan Sayyid Qutb ditentang oleh pihak militer, dan juga menganggap gerakan IM menentang pemerintahan Nasser hingga berujung pada eksekusi mati kepada Sayyid Qutb.

---

<sup>12</sup> Sayed Khatab, "Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb," *Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (2002), h. 145–170.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Posisi Sayyid Qutb dalam organisasi IM sebagai ideolog tidak akan pernah tergantikan. Akar epistemologi yang digunakan oleh Sayyid Qutb telah mampu menarik jumlah pengikut yang besar, bahkan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara juga menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam tak terkecuali di Indonesia. Pemikirannya banyak diminati oleh kalangan pelajar asal Indonesia pada saat kuliah di Mesir dan Timur Tengah. Pengaruh pemikiran Sayyid Qutb di Indonesia bisa dilacak melalui gerakan Tarbiyah di Masjid Salman ITB. Gerakan ini kemudian menjadi partai Keadilan (saat ini PKS) yang memiliki konstruksi ideologi IM yang bertujuan untuk menerapkan sistem syariah di pemerintahan.

Pengaruh pemikiran politik Islam Sayyid Qutb bisa ditemukan dalam kerangka pemikiran Habib Rizieq Syihab. Dalam wacana NKRI Bersyariah, Rizieq banyak terpengaruh oleh pemikiran Sayyid Qutb perihal epistemologi dalam wacana politik Islamnya. Hal ini diungkapkan dalam tesisnya bahwa makna jahiliyah ditafsirkan dengan istilah hukum buatan manusia. Habib Rizieq mengutip beberapa ayat al-Qur'an maupun hadist untuk memperkuat argumentasi tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian, nash dijadikan sebagai konstruksi epistemologi dalam pemikiran Habib Rizieq.

Wacana NKRI Bersyariah merupakan sebuah pemikiran tentang penyatuan agama dan negara. Habib Rizieq menyatakan bahwa penyatuan agama dan negara merupakan anjuran atau sunnah Nabi yang harus ditegakkan demi terjaganya kebaikan dan terjauhkannya berbagai bentuk kemaksiatan. Di dalam pemikiran

---

<sup>14</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia* (Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012), h. 192–98.



tersebut Habib Rizieq menolak semua sistem yang bersumber dari manusia. Habib Rizieq mengutip Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa mengikuti sistem manusia maka sama halnya dengan kembalinya era jahiliyah. Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan, Habib Rizieq menolak sistem demokrasi Indonesia dan menganggap sistem tersebut lebih bahaya dari babi.<sup>15</sup>

Pemikiran politik Islam Habib Rizieq berupaya untuk menerapkan sistem syariah di Indonesia. Penerapan sistem syariah di Indonesia didasarkan atas dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Dalil *naqli* dan *aqli* yang digunakan oleh Habib Rizieq dijadikan sebagai legitimasi tentang NKRI Bersyariah. Di samping itu, dalil tersebut digunakan sebagai pijakan untuk memperkuat bahwa selain hukum Allah tidak diakui. Seperti halnya Sayyid Qutb, Habib Rizieq menyebut hukum Allah adalah satu-satunya hukum yang harus ditegakkan oleh manusia. Habib Rizieq menilai orang-orang yang memutus Allah dianggap kafir, zalim, fasik.<sup>16</sup>

Di samping konstruksi teks agama yang menegaskan bahwa penerapan syariat Islam merupakan ajaran agama, landasan historis yang juga dijadikan rujukan oleh Habib Rizieq pada Piagam Jakarta. Habib Rizieq menafsirkan Pembukaan UUD 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berbunyi Piagam Jakarta menjiwai ruh Pancasila, dengan pemahaman bahwa penerapan syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Habib Rizieq menafsirkan Dekrit Presiden tersebut dalam arti mencabut perubahan Pancasila sesudah Piagam Jakarta. Dengan kata lain,

---

<sup>15</sup> J. D. Wilson, "Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections," *ISEAS Perspective* 10, no. 24 February (2014).

<sup>16</sup> Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia*, h. 187.

menurut Habib Rizieq Pancasila yang seharusnya diberlakukan pasca Dekrit tersebut bukan Pancasila yang kini dianut melainkan Piagam Jakarta.

Posisi Piagam Jakarta memiliki peran penting dalam proyek penerapan syariah Islam di Indonesia. Proyek penerapan syariah dengan jalan aksi demonstrasi untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amandemen sudah dimulai sejak tahun 2000. Pada masa itu Habib Rizieq bersama organisasi Front Pembela Islam (FPI) beserta ormas Islam lainnya melakukan aksi di depan kantor DPR dengan tujuan agar Piagam Jakarta bisa dimasukkan ke dalam Amandemen UUD 1945. Upaya aksi ini berlanjut terus hingga pada kurun waktu tertentu sebelum Habib Rizieq mengubah pola gerakannya dengan cara lebih kultural.

Akan tetapi, wacana NKRI Bersyariah baru menemukan konsep yang matang, baik secara aksiologi maupun epistemologi, pada tahun 2012 tepatnya pasca selesainya program S2 di Malaysia dengan judul *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*. Di tahun yang sama Habib Rizieq juga menulis sebuah buku yang berjudul *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* yang berisikan tentang intisari dari tesisnya ditambah dengan kritikan maupun respon atas pemikiran dari Barat yang ada di Indonesia baik dari segi pemikiran, konsep bernegara, hukum, agama, hingga persoalan-persoalan sosial seperti LGBT. Pada tahun 2012 FPI mengadakan Milad ke 14 dan mengangkat Habib Rizieq sebagai bakal calon Presiden 2014 dengan membawa wacana NKRI Bersyariah. Forum itu

dikatakan bahwa para anggota FPI bersepakat untuk menjadikan Habib Rizieq sebagai presiden dalam NKRI Bersyariah.<sup>17</sup>

Akhir tahun 2016 merupakan tahun penting dalam pergerakan politik Islam di Indonesia. Habib Rizieq dan pemikirannya tentang NKRI Bersyariah menemukan babak baru. Pada saat itu terjadi rentetan aksi besar yang dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia untuk berdemonstrasi menurunkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur karena dianggap telah menistakan agama. Aksi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Aksi Bela Islam (ABI) atau yang saat ini dikenal dengan istilah Alumni 212. Habib Rizieq menjadi tokoh sentral dalam fragmentasi kelompok baru ini. Pemikiran NKRI Bersyariah Habib Rizieq memiliki kesempatan besar untuk mempengaruhi umat Islam lebih banyak lagi.

Dengan melihat posisi dan pemikiran Habib Rizieq tentang wacana NKRI Bersyariah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Penelitian ini akan memposisikan Habib Rizieq sebagai salah satu pemiki politik Islam kontemporer di Indonesia dengan wacana NKRI Bersyariah, dan bisa disejajarkan dengan wacana politik Islam lainnya seperti *khilafah*, *imamah*, maupun negara. Oleh sebab itu, sebagai salah satu konsep atau pemikiran, wacana NKRI Bersyariah memiliki konstruksi epistemologi sebagai syarat untuk disebut sebagai pengetahuan atau konsep. Ketertarikan ini dikarenakan dua hal; *pertama*, peneliti berasumsi bahwa ada semacam pemaksaan dalil-dalil untuk dijadikan sebagai landasan epistemologi dalam

---

<sup>17</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, Cet. 1 (Jakarta: Suara Islam Press, 2012), h. xii.

wacana NKRI Bersyariah; *kedua*, peneliti berasumsi tentang perumusan sejarah Pancasila Habib Rizieq yang dijadikan sebagai landasan ideologi NKRI Bersyariah masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa catatan penafsiran dalam bukunya tidak konsisten ketika menjelaskan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Analisis atas epistemologi NKRI Bersyariah akan dikaji dengan metode arkeologi dan genealogi Michel Foucault dan falsifikasi Karl R. Popper. Kedua metode ini berfungsi untuk mengkritisi aspek epistemologi NKRI Bersyariah. Metode arekologi dan genealogi melihat kemunculan NKRI Bersyariah dari sebuah diskontinuitas yang memiliki keterkaitan dengan pengetahuan dan kekuasaan, sedangkan falsifikasi untuk menguji pengetahuan tersebut apakah kokoh atau tidak. Dengan demikian, asumsi peneliti di atas akan mengantarkan kepada upaya kritis atas epistemologi NKRI Bersyariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja *muhaddidat* (motif-motif) yang menggerakkan NKRI Bersyariah?
2. Bagaimana bentuk *tajalliyat* (manifestasi) baik secara teori maupun praktik dalam NKRI Bersyariah?
3. Bagaimana hasil uji falsifikasi pengetahuan NKRI Bersyariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif-motif yang menggerakkan NKRI Bersyariah.

2. Untuk mengetahui bentuk atau manifestasi, baik secara teori maupun praksis, NKRI Bersyariah.
3. Untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan dalam pengetahuan NKRI Bersyariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis. Kegunaan penelitian ini dari aspek teoretis adalah untuk mengembangkan metode arkeologi dan genealogi serta falsifikasi Karl R. Popper dalam studi Islam. Serta mengembangkan nalar politik Islamnya Abd Al Jabiri dalam konteks keindonesiaan.
2. Secara praksis. Kegunaan praksis penelitian ini ialah agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui tentang pemikiran NKRI Bersyariah, baik secara epistemologi maupun praksis.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti dokumen, buku-buku dan riset terdahulu untuk kemudian dianalisis secara filosofis. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji pemikiran Habib Rizieq tentang konsep NKRI Bersyariah.

Studi kepustakaan ini akan didukung oleh dua sumber. Pertama sumber data primer dan kedua sumber data sekunder. Sumber data primer akan dititikberatkan pada tulisan-tulisan Habib Rizieq yang telah dijadikan buku, seperti buku *Dialog*

*FPI: Amar Ma'ruf Nahi Munkar,*<sup>18</sup> *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam,*<sup>19</sup> *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah,*<sup>20</sup> dan *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia.*<sup>21</sup> Kedua adalah sumber sekunder diambil dari penelitian terdahulu yang mengkaji Habib Rizieq, FPI, dan gerakan Islamisme di Indonesia.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan melihat lebih dalam lagi pikiran-pikiran Habib Rizieq yang termuat dalam tulisan maupun kajian yang pernah dilakukan. Model pengumpulan data ini dilakukan supaya data yang diperoleh bisa melihat lebih dalam lagi tentang kehidupan, pengalaman, dan situasi sosial-politik Habib Rizieq.

**c. Metode Analisis Data**

Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan metode arkeologi dan genealogi Michel Foucault. Metode arkeologi dan genealogi Foucault digunakan untuk membedah dan mengkritisi konsep NKRI Bersyariah. Metode arkeologi digunakan menyingkap pelbagai sistem dan model pemikiran dalam sejarah, sedangkan

---

<sup>18</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah), 2005.

<sup>19</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Hancurkan liberalisme, Tegakkan Syariat Islam* (Jakarta: Suara Islam Press, 2011).

<sup>20</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

<sup>21</sup> Syihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia*.

genealogi digunakan untuk membaca situasi dan keadaan sejarah di saat teks dan ide itu dibentuk. Foucault mendefinisikan arkeologi dan genealogi sebagai berikut:

*Archaeology defines the rules of formation of a group of statements. In this way it shows how a succession of events may, in the same order in which it is presented, become an object of discourse, be recorded, described, explained, elaborated into concepts, and provide the opportunity for a theoretical choice.*<sup>22</sup>

*Genealogy is gray, meticulous, and patiently documentary. It operates on a field of entangled and confused parchments, on documents that have been scratched over and recopied many times... Genealogy, consequently, requires patience and acknowledge of details and it depends on a vast accumulation of source material. Its 'cyclopean monuments' are constructed from 'discreet and apparently insignificant truths and according to a rigorous method'; they cannot be the product of 'large and well-meaning errors'. In short, genealogy demands relentless erudition. Genealogy does not oppose itself to history as the lofty and profound gaze of the philosopher might compare to the molelike perspective of the scholar; on the contrary, it rejects the meta-historical deployment of ideal significations and indefinite teleologies. It opposes itself to the search for 'origins'.*<sup>23</sup>

Arkeologi mendefinisikan aturan pembentukan sekelompok pernyataan. Dengan cara ini ia menunjukkan bagaimana suksesi peristiwa dapat, dalam urutan yang sama di mana disajikan, menjadi objek wacana, direkam, dijelaskan dalam konsep, dan memberikan kesempatan untuk pilihan teoretis.

Genealogi adalah abu-abu, teliti, dan mendokumentari dengan sabar. Ini beroperasi pada bidang perkamen yang terjerat dan membingungkan, pada dokumen yang telah ditelusuri dan dibuka kembali berkali-kali ... Oleh karena itu, genealogi memerlukan kesabaran dan pengakuan detail dan itu tergantung pada akumulasi yang sangat besar dari bahan sumber. 'Monumen cyclopeannya' dibangun dari 'kebenaran yang diam-diam dan tampaknya tidak penting dan menurut metode yang ketat'; mereka tidak dapat menjadi produk dari 'kesalahan besar dan bermaksud baik'. Singkatnya, genealogi menuntut pengetahuan tanpa henti. Genealogi tidak menentang dirinya sendiri sebagai sejarah karena pandangan filsuf yang tinggi dan mendalam dapat dibandingkan dengan perspektif seperti seorang sarjana; sebaliknya, ia menolak penyebaran meta-historis dari

---

<sup>22</sup> Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge* (Routledge, 2013) h. 128.

<sup>23</sup> Michel Foucault and Gilles Deleuze, "Intellectuals and Power," *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews* 205 (1977), h. 209.

signifikansi ideal dan teleologi yang tidak terbatas. Itu menentang dirinya untuk mencari 'asal'

Metode tersebut digunakan untuk membedah konsep NKRI Bersyariah. Pertama-tama membedah arkeologi wacana NKRI Bersyariah. Metode arkeologi untuk membaca tentang adanya diskontinuitas dalam pembentukan wacana NKRI Bersyariah. Kedua melihat adanya pergeseran episteme dari rezim pengetahuan satu ke yang lainnya. Asumsi dasarnya adalah wacana NKRI Bersyariah hadir dari diskontinuitas rezim pengetahuan. Metode arkeologi tidak cukup untuk melihat relasi kuasa dalam rezim pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, metode genealogi digunakan untuk melihat lebih fokus lagi tentang adanya relasi kuasa dalam wacana NKRI Bersyariah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan.

Metode arkeologi dan genealogi hanya berbicara tentang konteks historisitas lahirnya sebuah pengetahuan NKRI Bersyariah. Metode ini belum cukup untuk menguji pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, Peneliti juga akan menggunakan metode falsifikasi Karl R. Popper untuk menguji ketahanan dari pengetahuan NKRI Bersyariah. Metode falsifikasi merupakan sebuah upaya untuk melihat pengetahuan dari sisi kesalahan. Apabila sebuah pengetahuan itu bisa bertahan dalam uji ini, maka pengetahuan tersebut akan semakin kokoh atau dalam bahasa Popper disebut penguatan (*corroboration*). Namun kokohnya pengetahuan tersebut hanya bersifat sementara, sebab apabila ditemukan kesalahan, meskipun sedikit, teori itu akan jatuh. Karl P. Popper lebih lanjut mengatakan bahwa:



Harus diperhatikan bahwa suatu putusan positif hanya dapat mendukung teori itu untuk sementara waktu, karena putusan-putusan negatif berikutnya selalu mungkin menjatuhkannya. Selama sebuah teori mampu bertahan menghadapi ujian-ujian yang terperinci dan keras, dan ia tidak digantikan oleh teori lain dalam perjalanan gerak maju ilmiah, kita dapat mengatakan bahwa ia telah membuktikan keberaniannya atau ia telah dikoroborasikan.<sup>24</sup>

Metode falsifikasi ini penting untuk menguji sebuah pengetahuan, sebab dari situ sebuah pengetahuan akan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Popper mengatakan bahwa semua pengetahuan tidak bersifat umum, oleh karenanya Popper memberi istilah pengetahuan dengan hipotesis. Pengembangan ilmu atau hipotesis bisa berhasil apabila telah melalui uji hipotesis. Upaya uji hipotesis inilah yang dimaksud dengan falsifikasi. Falsifikasi juga menjadi alat penentu demarkasi, pembeda, antara yang disebut Popper dengan *genuine science* (ilmu asli) dan apa yang disebut dengan *pseudo science* (ilmu tiruan). Di samping itu, metode falsifikasi ini menggunakan logika dari persoalan atau pengetahuan itu sendiri bukan dari pengetahuan lainnya.

Dengan demikian, maka modal analisis data NKRI Bersyariah menggunakan dua perangkat sekaligus. Pertama metode arkeologi dan genealogi Michel Foucault untuk mengetahui secara historis kemunculan wacana NKRI Bersyariah. *Kedua*, untuk menguji epistemologi atau pengetahuannya menggunakan metode falsifikasi Karl R. Popper. Metode

---

<sup>24</sup> Karl R. Popper, *Logika Penemuan Ilmiah*, Terj. Saut Pasaribu dan Aji Sastrowardoyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 12.

falsifikasi ini menggunakan logika nalar politiknya Habib Rizieq sendiri dan bukan dari pengetahuan lain.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian kebangkitan Islam secara umum memang sudah banyak diteliti tetapi belum untuk pemikiran NKRI Bersyariah Habib Rizieq. Hal ini dikarenakan wacana NKRI Bersyariah merupakan fenomena baru dalam diskursus perpolitikan Islam di Indonesia. Selama ini, kajian tentang politik Islam juga difokuskan pada aspek gerakan sosial maupun pada ranah politik itu sendiri. Di Indonesia, kajian tentang Islam politik telah banyak diteliti, baik sejak era awal kemerdekaan hingga pasca Reformasi. Terdapat dua bentuk kajian yang relevan dalam penelitian ini, pertama penelitian tentang hubungan politik syariat Islam dan kedua penelitian tentang Habib Rizieq.

Hubungan antara Islam dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah usai. Sejak pertama kali republik ini dibentuk, pertarungan wacana tentang islam dan negara menjadi tema serius. Dalam penelitian Luthfi Assyaukanie mengatakan bahwa diskursus Islam dan negara sudah dimulai sejak Orde Lama. Ia menemukan bahwa terdapat tiga kategori hubungan Islam dan negara yaitu demokrasi Islam, demokrasi agama, dan demokrasi liberal.<sup>25</sup> Penerapan ideologi Islam tidak lah utopia, namun ia akan berlangsung terjadi. Haedar Nashir menunjukkan bahwa terdapat beberapa

---

<sup>25</sup> Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011).

daerah yang telah menerapkan peraturan syariah.<sup>26</sup> Akan tetapi, Nashir melihat dari aspek gerakan sosial Islam politik di Indonesia.

Di samping Haedar Nashir juga terdapat Michael Buehler yang melihat islamisasi politik di Indonesia pasca-reformasi. Tesis yang dibawa oleh Buehler adalah mengapa ada peningkatan hukum syariah di Indonesia meskipun partai-partai Islam tidak mendominasi dalam perpolitikan nasional. Ia berargumen bahwa ada pengaruh dari luar partai politik yang mendorong terbentuknya hukum syariah di peraturan daerah sebagai konsekuensi demokratisasi di Indonesia.<sup>27</sup> Tesis Buehler lebih melihat pada pengaruh dari politikus Islam dari partai non-Islam terhadap politik di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang memfokuskan pada Habib Rizieq. Penelitian Ian Wilson yang mengatakan bahwa pada pemilu 2014, FPI dan Rizieq Syihab menolak sistem demokrasi sekular Indonesia dan menganjurkan untuk menerapkan sistem Islam yang telah ditetapkan dalam konstitusi awal negara Indonesia,<sup>28</sup> dalam hal ini Piagam Jakarta. Fokus penelitian Wilson terletak pada penolakan Habib Rizieq terhadap demokrasi di Indonesia. Namun Wilson belum menganalisis lebih dalam lagi tentang NKRI Bersyariah Habib Rizieq Syihab. Sementara dalam aspek pemikiran ada satu penelitian yang ditulis oleh Farwah Quraisyiah yang memfokuskan pada pemikiran dakwah Habib Rizieq Syihab.

---

<sup>26</sup> Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013).

<sup>27</sup> Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

<sup>28</sup> J. D. Wilson, "Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections," *ISEAS Perspective* 10, no. 24 February (2014).

Pemikiran dakwah yang ditemukan dalam Habib Rizieq meliputi *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditegakkan secara tegas dan Keras. Cara ini digunakan karena menurut Habib Rizieq merupakan ketentuan dari al-Qur'an dan sunnah agar masyarakat mempunyai rasa kewajiban dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan bagian dari tegaknya syariat Islam.<sup>29</sup>

Di samping pemikiran tentang dakwah Habib Rizieq yang sudah ditulis oleh Farwah juga terdapat kajian yang meneliti pemikiran Habib Rizieq tentang hubungan Islam dan Pancasila ditulis oleh Abel Herdi Deswan Putra. Hasil penelitian yang ditulis oleh Putra menunjukkan bahwa hubungan Islam dan Pancasila termasuk pemikiran yang bersifat integralistik. Hal tersebut dibuktikan dengan keinginannya untuk menjadikan syariat Islam sebagai hukum formal dalam bernegara.<sup>30</sup> Dasarnya ialah bahwa Islam merupakan *din wa dawlah*. Namun pemikiran dan gerakan Habib Rizieq di atas justru membuat nama Habaib dari Hadrami tercoreng.

Penelitian Chaedar Bamualim menemukan bahwa Habib Rizieq Syihab sebagai seorang Hadrami keturunan Arab yang mendapat kritikan atau ketidaksukaan dari muslim pribumi Indonesia. Hal itu didasarkan pada gerakan dan pemikiran Habib Rizieq beserta FPI memperjuangkan syariat Islam dengan cara kekerasan. Hasilnya adalah terjadi perpecahan dalam komunitas Hadrami di Indonesia.<sup>31</sup> Sementara

---

<sup>29</sup> Farwah Quraisyiah, "Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, Ma," Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014.

<sup>30</sup> Abel Herdi Deswan Putra, "Relasi Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab", Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.

<sup>31</sup> Chaider S. Bamualim, "Islamic Militancy and Resentment against Hadhramis in Post-Suharto Indonesia: A Case Study of Habib Rizieq Syihab and His Islamic Defenders Front," *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 31, no. 2 (2011), h. 267–281.

penelitian yang melihat ketokohan Habib Rizieq di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Umar Junior<sup>32</sup> dan Fikry Muhammady<sup>33</sup>. Namun dalam buku tersebut hanya dijelaskan dari segi personal atau ketokohan bukan dari segi pemikiran maupun gerakan Habib Rizieq.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini didasarkan atas kajian epistemologis tentang pemikiran NKRI Bersyariah. Penelitian ini berfokus membahas wacana NKRI Bersyariah secara filosofis tentang konstruksi nalar epistemologi dengan menggunakan pendekatan arkeologi dan genealogi Foucault. Teori yang digunakan selanjutnya adalah teori nalar politik al Jabiri.

## **G. Kerangka Teori**

### **Nalar Politik Arab-Islam Abid Al Jabiri**

Abid Al Jabiri menguraikan banyak hal tentang nalar politik Arab-Islam dalam buku *Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi: Al-Muhaddidat wa al-Tajalliyat*. Buku tersebut dipahami sebagai “motif-motif (*muhaddidat*) tindakan politik (cara menjalankan kekuasaan dalam sebuah masyarakat), serta manifestasi (*tajalliyat*) teoritis dan praksisnya yang bersifat sosiologis.” Dalam konteks ini, nalar dipahami sebagai motif-motif tindakan dan manifestasinya dalam realitas praktis. Sedangkan istilah politik (*siyasi*) tidak dipahami sebagai reproduksi kekuasaan, melainkan menjalankan se bentuk kekuasaan. Maka dari itu, buku ini menjelaskan terkait dengan nalar realitas

---

<sup>32</sup> Ibnu Umar Junior, *The Legend; Biography Of Habib Rizieq Shihab; Singa Allah Dari Negeri Timur* (Jakarta: Pujangga Tunggal, 2017).

<sup>33</sup> Fikry Muhammadi, *Sisi Lain Habib Rizieq* (Jakarta: Zahira, 2017).

Arab, bukan nalar epistemologi atau teoretis Arab sebagaimana yang ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya (*Bunyah al-Aql al-Arabi* dan *Takwin al-Aql al-Arabi*).<sup>34</sup>

Terdapat dua pendekatan ilmu sosial kontemporer yang digunakan al Jabiri. *Pertama*, pendekatan Regis Debray tentang *political unconsciousness* (ketidaksadaran politik) untuk menganalisis sisi psikologi. Sedangkan yang kedua adalah imajinasi sosial-politik. Imajinasi sosial-politik diambil dari konsep tindakan sosial Max Weber yang mengandaikan bahwa suatu tindakan memiliki tujuan, motif, dan nilai tertentu, sehingga melalui tindakan seorang individu dapat dikenali identitasnya.<sup>35</sup>

#### ***Political Unconsciousness dan Imajinasi Sosial-Politik***

Merujuk pada ilmu sosial psikologi, ada beberapa macam perilaku yang muncul dari diri manusia tanpa kesadaran. Sigmund Freud menyatakan bahwa pikiran bawah sadar (*unconscious*) terdiri dari motif-motif naluriah dan keinginan yang tersimpan, yang mengarahkan tindakan atau sikap manusia. Ketidaksadaran ini bukan bersifat individual, melainkan bersifat kolektif. Secara umum masyarakat digerakkan oleh ketidaksadaran dalam bertindak atau berperilaku. Hal ini merupakan sebuah aktualisasi diri manusia dari memori-memori kolektif struktur masyarakat yang terinternalisasi dalam diri manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> M. Hasan Ubaidillah, "Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-Jabiri," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (2012): 68–96.

<sup>35</sup> Muhammad Abid al Jabiri, *Al-'Aql al-Siyâsi al-'Arabi, Muhaddidat Wa Tajalliyat* (Beirut: Markaz as-Tsaqafy al-'Araby, 1991), 12–16.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Debray menyatakan bahwa ketidaksadaran politik pada umumnya berlaku pada masyarakat luas yang terorganisir, kesukuan, bangsa, dan semacamnya. Debray menambahkan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan politik mereka, tetapi keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Dengan kata lain, fenomena politik dibangun berdasarkan ketidaksadaran politik. Ketidaksadaran ini lah yang didefinisikan sebagai pikiran bawah sadar, yang mengatur hubungan antara individu dan antara komunitas.

Debray menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji ketidaksadaran politik di Eropa. Konsep tersebut tidak diambil secara mentah-mentah oleh Al Jabiri. Al Jabiri merekonstruksi atau mereformulasi konsep tersebut untuk melihat ketidaksadaran politik dalam bangsa Arab-Islam. Menurut Al Jabiri ada ketidaksamaan struktur dalam masyarakat Eropa dan Arab-Islam. ketidaksamaan struktur ini lah yang membedakan dorongan atau motif ketidaksadaran politik antara masyarakat Arab dengan Eropa.

Al Jabiri menyatakan konsep tersebut hanya bisa digunakan untuk menganalisis ketidaksadaran politik dalam masyarakat industri seperti Eropa. Akan tetapi, dalam konteks Arab-Islam, yang *notabene* belum beranjak ke masyarakat industri, maka struktur hubungan atau relasinya didasarkan atas relasi keluarga atau etnik. Maka dari itu, Al Jabiri merekonstruksi gagasan Debray untuk menyesuaikan dengan kondisi sosio-historis masyarakat Arab-Islam. Menurut Al Jabiri, hubungan sosial bersifat kekeluargaan yang mendominasi relasi masyarakat Arab hingga hari

ini. Dengan demikian, fokus kajian Al Jabiri terletak pada pencarian tentang apa yang berada dalam bawah sadar politik masyarakat Arab-Islam.<sup>37</sup>

Pendekatan selanjutnya adalah imajinasi sosial-politik. Konsep imajinasi sosial politik ini untuk mengkaji apa yang terdapat dalam bawah sadar politik (*political unconsciousness*) masyarakat Arab-Islam. Al Jabiri menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk mengungkapkan imajinasi sosial-politik tersebut. Melalui pendekatan ini Al Jabiri ingin mengungkapkan motif-motif di balik tindakan atau perilaku masyarakat Arab-Islam.

Al Jabiri mendefinisikan imajinasi sosial-politik sebagai kumpulan imajinasi yang memenuhi nalar kognitif bangsa Arab, baik dalam cerita-cerita, kisah-kisah kepahlawanan, yang semuanya bersumber dari tradisi Arab-Islam klasik. Al Jabiri memposisikan nalar politik sebagai praktik dan ideologi dan hal ini merujuk pada konsep imajinasi sosial bukan pada ranah *episteme*. Dengan demikian, imajinasi sosial dapat dipahami sebagai seperangkat persepsi, kriteria dan nilai-nilai yang mendorong ideologi politik sebagai struktur ketidaksadaran.<sup>38</sup>

Selain itu, imajinasi sosial-politik yang dibayangkan oleh Habib Rizieq tidak hanya didasarkan atas negara yang dibangun oleh Nabi, melainkan juga didasarkan atas era kerajaan Islam di Nusantara yang pernah berjaya di masa silam. Menurut Habib Rizieq, kerajaan Islam di Nusantara telah menerapkan hukum atau syariat dalam menjalankan pemerintahannya. Ia juga menambahkan bahwa hukum Islam ini

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 12-13.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 14-16.



tidak bisa dihapus oleh pemerintahan Belanda di masa penjajahan. Oleh sebab itu, pemberlakuan hukum Islam yang ada di era kerajaan menjadi imajinasi sosial-politik Habib Rizieq

Dua perangkat metodologi di atas digunakan Al Jabiri untuk menghubungkan nalar politik Arab-Islam dengan merujuk pada konsep motif-motif (*muhaddidat*) dan manifestasinya (*tajalliyat*) dalam kenyataan masyarakat Arab-Islam. Hal ini merupakan sebuah kajian psikologis maupun sosiologis karena melibatkan unsur individual dan kolektif. Pendekatan imajinasi sosial-politik dan ketidaksadaran politik merujuk pada pembahasan terkait motif-motif yang menggerakkan politik Arab-Islam, sedangkan manifestasinya merujuk pada konsep bernegara secara praksis maupun teoritis yang diterapkan oleh generasi pasca kenabian ditandai dengan kemunculan dinasti atau kerajaan Islam.

### **Motif-Motif Penggerak Nalar Politik Arab-Islam**

Al Jabiri menggunakan konsep nalar sebagai motif penggerak politik Arab-Islam. Konsep motif-motif sendiri diambil Al Jabiri dari Ibn Khaldun untuk menyelaraskan epistemologi dari perspektif masa lalu dengan masa kini. Adapun konsepnya ialah; *Pertama*, fanatisme kelompok (*al-asyabiyyah al-qabiliyyah*); *Kedua*, dakwah keagamaan (*al-da'wah al-diniyyah*); *Ketiga*, *ghanimah*.<sup>39</sup> Al Jabiri

---

<sup>39</sup> Ghanimah atau harta rampasan bukan merupakan faktor yang determinan dalam diskursus nalar politik Arab-Islam pada masa itu. Hanya saja Ibn Khaldun menyinggung sedikit konsep tersebut dengan merujuk pada cara produksi ekonomi masyarakat Arab. sedangkan Al Jabiri kemudian merekonstruksi pemahaman ghanimah dengan merujuk pada sejarah dakwah nabi yang ditentang oleh masyarakat Mekkah dengan motif ekonomi. Lihat *Ibid.*, hlm. 49-52.

menggunakan ketiga motif ini untuk menjelaskan terkait nalar politik Arab-Islam yang terjadi sejak era kenabian sampai era dinasti Islam.

Dari ketiga motif di atas akan digunakan untuk melihat dan menganalisis wacana NKRI Bersyariah Habib Rizieq Syihab. Namun sebelum itu perlu ditegaskan lagi bahwasanya konsep NKRI Bersyariah merupakan satu dari sekian banyak wacana politik Islam di dunia, baik di negara-negara Arab-Islam maupun di negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan persepsi dan sejarah atas munculnya gerakan politik Islam di dunia modern. Secara implisit persamaan persepsi dan sejarah bisa dilihat dari segi imajinasi sosial-politik dan motif-motif dari wacana NKRI Bersyariah dengan pemikiran politik Islam lainnya.

Wacana NKRI Bersyariah didorong oleh motif-motif atau nalar politik Arab-Islam klasik. Kajian motif-motif dalam Wacana NKRI Bersyariah akan memanfaatkan pendekatan ilmu sosial kontemporer seperti yang dilakukan oleh Al Jabiri. Hal ini didasarkan atas asumsi Al Jabiri bahwa ada persamaan motif yang digunakan oleh para pemikir politik Islam kontemporer, sehingga alat analisis yang digunakan oleh Al Jabiri bisa digunakan untuk melihat imajinasi sosial-politik dan ketidaksadaran politik yang mendorong wacana NKRI Bersyariah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang tentang persoalan NKRI Bersyariah dalam perpolitikan di Indoensia, kemudian akan ditarik ke dalam rumusan masalah, dan akan dibahas juga terkait dengan untuk membaca konsep NKRI Bersyariah.

Pada bagian kedua membahas tentang genealogi pengetahuan Habib Rizieq. Pembahasan ini akan berfokus pada sejarah kehidupan Habib Rizieq, konstruksi pengetahuannya, hingga gerakan politiknya. Pembahasan ini dirasa penting sebab korelasi pengetahuan yang akan diujikan tidak lepas dari genealogi Habib Rizieq sendiri.

Pada bagian ketiga akan membahas tentang konsep dasar dalam wacana NKRI Bersyariah. Berbagai argument yang disampaikan untuk memperkuat wacana tersebut akan diutarakan dalam bab ini. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kritikan Habib Rizieq atas Indonesia saat ini. Kemudian pembahasan dalam bab ini juga akan membahas tentang argumentasi dasar konsep NKRI Bersyariah sebagai solusi atas kritiknya terhadap Indonesia yang dimulai dari nalar tafsir nashnya hingga tafsir dasar negaranya.

Pada bagian keempat akan menguji atau falsifikasi terhadap wacana NKRI Bersyariah. Bagian awal dalam bab ini akan membahas tentang bentuk atau wujud negara NKRI Bersyariah. Kemudian pembahasannya berlanjut pada falsifikasi pengetahuan atau nalar yang membentuk NKRI Bersyariah.

Pada bagian kelima tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

NKRI Bersyariah merupakan sebuah wacana pemikiran politik Islam kontemporer yang hadir di era pasca-reformasi saat ini. NKRI Bersyariah dibawa oleh Habib Rizieq sebagai tawaran untuk memperbaiki Indonesia yang dianggap telah gagal dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Habib Rizieq bersama FPI berjuang bersama-sama untuk menerapkan syariat Islam secara konstitusional. Habib Rizieq berusaha untuk mengganti rumusan dasar negara dengan Piagam Jakarta. Perjuangan ini menandakan bahwa negara dalam cita-cita Habib Rizieq dibentuk tidak hanya berdasarkan tradisi Arab-Islam melainkan juga tradisi Nusantara.

Secara genealogi, kemunculan gagasan NKRI Bersyariah berawal dari pengalaman Habib Rizieq selama mengenyam pendidikan di Indonesia dan di Arab Saudi. Habib Rizieq menggeluti bidang fiqh (syariah) sebagai konsentrasi ilmunya. Habib Rizieq menyukai bidang fiqh dan syariah sejak beliau kecil. Besar di lingkungan para orang Hadramaut membuat dirinya dikenal luas oleh kelompok tersebut. Setelah pulang dari perjalanan mencari ilmunya, Habib Rizieq menghabiskan waktunya untuk berdakwah di sebuah majlis ta'lim di sekitar rumahnya. Di sela-sela waktunya berdakwah, Habib Rizieq menggunakan waktunya untuk menulis buku dan artikel sebagai rujukan gerakan FPI.

Di sisi lain, kehadiran wacana NKRI Bersyariah di tengah wacana politik Islam kontemporer juga tidak lepas dari sejarah gerakan politik Islam di Indonesia. Sejak jatuhnya Orba dan masuk di era reformasi, banyak bermunculan organisasi-organisasi keislaman yang mencoba menyuarakan aspirasi politiknya dengan memanfaatkan kebebasan berserikat yang diberikan oleh negara. Habib Rizieq bersama organisasi non-mainstream lainnya turut serta meramaikan diskursus politik Islam pasca reformasi. Pada awalnya FPI muncul tidak memiliki bentuk baku tentang konsep politiknya. Wacana politik NKRI Bersyariah merupakan sebuah wacana baru yang dijadikan FPI sebagai cita-cita politiknya. Tidak seperti organisasi lainnya yang memiliki ide dan konsep dulu, setelah itu membuat wadahnya seperti MMI, HTI, dan PKS.

Kehadiran wacana NKRI Bersyariah tidak lepas dari adanya konstruksi epistemologi yang digunakan oleh Habib Rizieq. Konstruksi epistemologi dalam pengertian Abid Al Jabiri merupakan sebuah perangkat pengetahuan yang menggerakkan nalar politik Habib Rizieq. Dalam persepektif Al Jabiri, nalar politik Habib Rizieq digerakkan oleh dua motif, yaitu motif ideologi atau keyakinan dan motif sektarianisme kelompok. Motif ideologi dibuktikan dengan upaya Nabi dalam menggerakkan masyarakat Arab berdasarkan keyakinan agama, yaitu Islam. Sementara motif ashabiyah atau sektarianisme kelompok didasarkan atas dakwah Nabi yang tidak hanya didorong oleh motif ideologi melainkan juga motif ikatan solidaritas kesukuan.

Motif ideologi dalam NKRI Bersyariah dibuktikan dengan adanya persepsi Habib Rizieq yang mengatakan bahwa Nabi tidak memisahkan adanya urusan agama dan negara. Pemahaman ini yang melandasi Habib Rizieq untuk mengonstruksi pengetahuannya terkait dengan upayanya untuk mendirikan negara Islam. Konstruksi pengetahuan ini juga mengambil dari tradisi islam lainnya seperti dalil nash al-Qur'an maupun hadist. Dengan motif ini, Habib Rizieq mencoba untuk merekonstruksi ulang bagaimana bangunan masyarakat Arab-Islam di era Nabi untuk dikembangkan di era saat ini.

Selain itu, motif ideologi yang menggerakkan Habib Rizieq adalah berasal tradisi Nusantara. Habib Rizieq membaca dan menafsirkan sejarah Nusantara yang sudah menerapkan sistem syariat Islam sejak era kerajaan hingga kolonial. Fakta sejarah ini kemudian ditafsirkan dan dijadikan sebagai landasan ideologinya untuk membentuk sebuah negara NKRI Bersyariah di era saat ini. Adalah Piagam Jakarta yang coba diusung kembali oleh Habib Rizieq sebagai konstitusi negara Indonesia. Habib Rizieq berargumen bahwa Piagam Jakarta merupakan rumusan otentik dari hasil sidang BPUPKI, sementara Pancasila rumusan PPKI menurutnya sudah dihinati oleh kelompok nasionalis sekular yang tidak menginginkan Islam sebagai identitas bangsa.

NKRI Bersyariah juga digerakkan oleh motif kelompok atau *ashabiyah*. Motif kelompok dalam wacana NKRI Bersyariah dibuktikan dengan adanya relasi dan dukungan dari kelompok Habib Rizieq. Perlu diketahui bahwa FPI merupakan sebuah

organisasi yang pada mulanya tidak memiliki basis politik, namun lambat laun pandangan politik FPI menggunakan konsep wacana NKRI Bersyariah. Dengan kata lain, FPI memberikan dukungan kepada Habib Rizieq untuk terus memperjuangkan terwujudnya NKRI Bersyariah di Indonesia. Ikatan solidaritas Habib Rizieq semakin berkembang ketika beliau bekerjasama dengan MUI, FUI, FBR, dan di saat Aksi Bela Islam Habib Rizieq mampu membuat sebuah fragmentasi baru dalam Islam di Indonesia.

Kedua motif yang menggerakkan NKRI Bersyariah tujuannya adalah untuk membentuk negara Islam versi Habib Rizieq. Bentuk (*tajalliyat*) negara versi Habib Rizieq adalah negara Islam. Negara Islam Islam yang diharapkan oleh Habib Rizieq adalah negara republik. Negara republik Islam versi Habib Rizieq adalah sebuah negara yang mengedepankan syariat Islam. Hukumnya menggunakan syariat Islam; ekonominya menggunakan syariat Islam; bahkan nalar keagamaannya juga berdasarkan pemahaman tekstualis nash. Dalam sebuah negara Islam versi Habib Rizieq, Habib Rizieq menolak adanya kebebasan berpikir terutama terkait dengan pemahaman nash agama.

Namun bangunan argumentasi pengetahuan Habib Rizieq terkait dengan pembentukan negara Islam Indonesia tidak bisa dikokohkan. Sebab, dalam penelitian ini menemukan adanya pemaksaan pemahaman tentang tafsir agama yang mengutarakan untuk diterapkannya syariat Islam secara harfiah, tanpa ada penafsiran lain terkait nash agama yang dijadikan rujukan. Dasar nash yang merujuk pada

kewajiban menjalankan syariat Islam ditafsirkan tidak hanya dalam bentuk individu, melainkan juga dalam ranah negara. Negara berkewajiban untuk mengontrol kebijakan syariat Islam oleh semua warga negaranya.

Penelitian ini tidak hanya menemukan pemaksaan penafsiran penerapan syariat Islam dalam bentuk negara, melainkan juga menemukan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan fakta sejarah aslinya terkait dengan rumusan Pancasila. Dalam naskah asli yang ditulis oleh Muh. Yamin tidak ditemukan adanya sebuah lontaran pertanyaan kepada anggota sidang terkait dengan pemilihan negara musyawarah atau demokrasi. Namun Habib Rizieq berargumen bahwa pada saat itu Soekarno membuat sebuah pertanyaan kepada audien untuk memilih negara musyawarah atau demokrasi. Apabila hal ini diujikan atau difalsifikasikan maka hasilnya tidak bisa dikokohkan. Sebab ada ketidaksesuaian pengetahuan Habib Rizieq dengan fakta sejarah yang asli.

Penelitian ini menilai bahwa apabila konsep NKRI Bersyariah terwujud dengan argumentasi yang tidak terkokohkan di atas, maka bentuk negara yang diambil akan bersifat represif dan diskriminatif. Alih-alih ingin memperbaiki keadaan Indonesia, namun justru bentuk negara NKRI Bersyariah akan memiliki dampak kehancuran yang lebih parah. Apa yang dipertaruhkan dalam negara Islam versi Habib Rizieq adalah persatuan bangsa. Ketika sebuah negara atau politik berselingkuh dengan agama, baik agama yang bernalar burhani maupun bayani, bentuknya akan tirani, diskriminatif, dan represif.



Persoalan ini juga yang belum dijelaskan oleh Abid Al Jabiri. Ketika Al Jabiri menjelaskan tentang adanya gerakan Islamisme yang sedang melanda Timur Tengah, Al Jabiri mencoba mencari motif yang menggerakkannya. Al Jabiri berkesimpulan bahwa motif yang menggerakkan ada tiga yaitu motif ideologi atau aqidah, motif kelompok, dan motif ekonomi. Dari ketiga motif ini Al Jabiri mencoba memberikan sebuah gambaran tentang hubungan agama dan politik.

Namun pembahasan Al Jabiri tentang nalar politiknya belum sampai pada taraf aksiologis. Pada saat Al Jabiri menjelaskan tentang hubungan antara agama dan politik, di samping Al Jabiri merujuk pada tradisi politik Arab-Islam, Al Jabiri juga berupaya untuk mendialogkan antara agama dan politik. Fenomena islamismenya yang mengambil bentuk negara-agama dibuktikan dengan adanya berbagai kekejian pemerintahan di satu sisi, dan di sisi lain Al Jabiri juga menolak adanya pemahaman sekularisme (pemisahan antara agama dan politik) karena tidak sesuai dengan nalar politik Arab-Islam. Berpijak pada pemahaman seperti ini Al Jabiri sampai pada kesimpulan yang tidak memiliki ukuran pasti, bagaimana batasan hubungan antara agama dan politik.

Kontekstualisasi Islam dan demokrasi yang diangan-angankan oleh Al Jabiri belum bisa dijadikan cara untuk mengukur seberapa jauh keterlibatan agama dalam politik. Sebab, apabila keterlibatan agama lebih dominan dalam politik maka negara itu akan menjadi negara-agama (integralistik), begitu juga apabila agama memiliki pengaruh sedikit maka negara bisa terjebak dalam sekularistik. Secara teoritik, Al

Jabiri memang berhasil membuat pemahaman yang jelas terkait dengan hubungan agama dan politik, namun konsepnya belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana batasan antar kedua entitas tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang bisa penulis berikan kepada pengkaji politik Islam dalam bidang filsafat selanjutnya adalah tidak terbatas pada dimensi ide dan praktik saja karena bisa terjebak dalam ranah kajian politik. Kajian filsafat politik Islam kedepannya lebih menfokuskan pada dimensi nalar atau logika berpikir dari pemilik ide. Masing-masing gagasan diletakkan pada dimensi pengetahuan, sehingga peneliti bisa menguraikan secara detail, baik secara epistemologi maupun konstruksi nalarnya, tentang ide politik Islam tersebut. Dalam posisi ini lah kajian filsafat politik Islam akan berbeda dengan kajian politik secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Dalam Jurnal Al-Jami'ah* 39, no. 2 (2001).
- Abdurrahman, Wahid. *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta, The Wahid Institute, 2006.
- Al Mawardi, Imam, and Fadhli Bahri. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta. Darul Falah, 2000.
- A'la Al-Maududi, Abul. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Jabiri, M Abid. *Al-'Aql as-Siy Si al-'Araby, Muhaddidat Wa Tajalliyat*. Beirut: Markaz as-Tsaqafy al-'Araby, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Syura: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tragedi Intelektual, Perselingkuhan Politik dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Alif. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Formasi Nalar Arab*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Aswar, Hasbi. "Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia." *The Journal of Islamic Studies and International Relations* 1, no. 1 (2016): 15–30.
- Aziz, Abdul. *Politik Fundamentalisme: Majelis Mujahidin Indonesia Dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam*. Yogyakarta: Institute of International Studies. 2011.
- Bamualim, Chaider S. "Islamic Militancy and Resentment against Hadhramis in Post-Suharto Indonesia: A Case Study of Habib Rizieq Syihab and His Islamic Defenders Front." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 31, no. 2 (2011): 267–281.
- Bastari, Ahmad. "Strategi Perang Badar Menurut Ibnu Hisyam Dan Al-Thabari." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7, no. 2 (2011): 79–93.

- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Esai-Esai tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Black, Antoni. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Kini*. Jakarta: Serambi Ilmu, 2001.
- Bubalo, Anthony, Greg Fealy, Whit Mason, Syamsul Rijal, and Zacky Khairul Umam. *PKS & Kembarannya Bergiat Jadi Demokrat Di Indonesia, Mesir & Turki*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Calvert, John. *Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Castles, Lance, and Herbert Feith. *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. New York: Cornell University Press, 1970.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama.
- Fealy, Greg, and Sally White. *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. London: Routledge, 2013.
- \_\_\_\_\_ and Ed Couteau Jean. *Sejarah Seksualitas: Seks Dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- \_\_\_\_\_ and Gilles Deleuze. "Intellectuals and Power." *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews* 205 (1977): 209.
- Gusti, A. B. *Menoh, Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Arrahmah.com. "Habib Rizieq: Demokrasi Lebih Bahaya Dari Babi." Accessed May 13, 2019. <https://www.arahmah.com/2013/04/02/habib-rizieq-demokrasi-lebih-bahaya-dari-babi/>.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad, Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Hasani, Adib. “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30.
- Hasbi, Ash-Siddieqy. *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Hasyim, Syafiq. “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom.” *Irasec’s Discussion Papers* 12 (2011): 3–26.
- Huntington, Samuel P. “Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia, Terj.” *M. Sadat Imail*, Yogyakarta: *Qalam*, 2002.
- Hurgronje, Christiaan Snouck. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. Vol. 2. INIS, 1995.
- Ibn Khaldūn. *Al Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1986.
- Ichwan, Moch Nur. “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- Ismail Hasani, and Bonar Tigor Naipospos. *Dari radikisme menuju terorisme: studi relasi dan transformasi organisasi Islam radikal di Jawa Tengah dan di Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Itmam, M. Shohibul. *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Terj. Masrohim. Jakarta: Risalah Gusti 1999.
- Junior, Ibnu Umar. *The Legend; Biography Of Habib Rizieq Shihab; Singa Allah Dari Negeri Timur*. Jakarta: Pujangga Tunggal, 2017.
- Kaelan. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2015.
- Khatab, Sayed. “Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb.” *Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (2002): 145–170.
- Kovacs, Amanda. “Saudi Arabia Exporting Salafi Education and Radicalizing Indonesia’s Muslims.” *GIGA Focus International Edition English*, no. 07

(2014).

Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. LP3ES. 1985.

Mahfudh, KH. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2008.

Makin, Al. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta", *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, vol. 24, no. 1, 2017.

Mubarak, M. Zaki, dan Iim Halimatusa'diyah. *Politik Syariat Islam Idiologi Dan Pragmatisme*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2014.

Muhammadi, Fikry. *Sisi Lain Habib Rizieq*. Jakarta: Zahira, 2017.

Mujibuddin, M. "The Strategy of the Nahdlatul Ulama in Maintaining Position and Legitimacy at the Indonesian Islamic Arena." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 41–58.

Munawar-Rachman, Budhy. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.

———. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.

———. *Argumen Islam Untuk Liberalisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Muqtada, Muhammad Rikza. "Utopia Khilāfah Islāmiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun." *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 145–164.

Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.

Nasr, Seyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*. New York: The New American Library, 1970.

Natsir, Mohammad. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da'wah, 2001.

———. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy, 2014.

Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik; Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

- Popper, Karl R. *Logika Penemuan Ilmiah, Terj. Saut Pasaribu Dan Aji Sastrowardoyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Putra, Abel Herdi Deswan. “Relasi Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab”, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.
- Quraisyiah, Farwah. “Pemikiran Dakwah Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, Ma,”. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014.
- Qutb, Sayyid, and A. Rahman Zainuddin. *Petunjuk Jalan*. International Islamic Federation of Student Organizations, 1981.
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Rosadi, Andri. *Hitam-Putih FPI: Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*. Jakarta: Nun Publisher, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alqur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
- Steenbrink, Karel Adriaan, Husnul Aqib Suminto, Suruyan A. Jamrah, and L. Yuliani. *Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia (1596-1942)*. Bandung: Mizan, 1995.
- Suminto, Husnul Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken*. LP3ES, 1996.
- Syihab, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein. *Hancurkan liberalisme, tegakkan syariat Islam*. Jakarta: Suara Islam Press, 2011.
- . *Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia*. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.
- Shihab, Habib Muhammad Riziq. *Dialog FPI-Amar Ma'rūf Nahī Munkar*. Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- . *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Cet. 1. Jakarta: Suara

- Islam Press, 2012.
- Taimiyah, Ibnu *Siyasah Syar'iyah: etika Politik Islam*, Terj. Rafi' Munawar. Surabaya: Risalah Gusti. 2005.
- Thalib, Sayuti. *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Tibi, Bassam. *Islam Dan Islamisme Terj.* Bandung: Mizan, 2016.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-Jabiri." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (2012): 68–96.
- Wilson, Ian Douglas. *Politik jatah preman: ormas dan kuasa jalanan di Indonesia pasca-Orde Baru*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2018.
- Wilson, J. D. "Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia's 2014 Elections." *ISEAS Perspective* 10, no. 24 February (2014).
- Woodward, Mark R., and Amanah Nurish. "Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam." *Maarif: Jurnal Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 11, no. 2 (2016): 105–22.
- Yamin, M., and U. U. D. Naskah Persiapan. "Risalah Sidang BPUPKI." *PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta*, 1959.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergualtan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zaidan, Abdul Karim. *Individu Dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Zul Asyri, L. A. *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Al-Khulafâ al-Rasyidûn*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.